



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Februari 2025/Periodik - 2024)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN AGAMA
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN ISLAM

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ALI SODIQ
2. Jabatan : KEPALA BIRO ADMINISTRASI UMUM DAN KEUANGAN
3. NHK : 939064

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp. 4.526.300.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 236 m2/185 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 960.000.000
2. Tanah Seluas 186 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 465.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 630 m2/88.2 m2 di KAB / KOTA KOTA YOGYAKARTA , HASIL SENDIRI Rp. 1.260.000.000
4. Tanah Seluas 456 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 410.000.000
5. Tanah Seluas 108 m2 di KAB / KOTA JEMBER, HASIL SENDIRI Rp. 350.000.000
6. Tanah Seluas 1014 m2 di KAB / KOTA BANTUL, HASIL SENDIRI Rp. 456.300.000
7. Tanah Seluas 1700 m2 di KAB / KOTA PURWOREJO, HASIL SENDIRI Rp. 425.000.000
8. Tanah Seluas 11164 m2 di KAB / KOTA PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR, HASIL SENDIRI Rp. 200.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp. 357.100.000**

1. MOTOR, YAMAHA 2DP RA A/T Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 22.800.000
2. MOTOR, HONDA ACH1M21B05 A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp. 9.200.000



3. MOTOR, HONDA NC12AF2CBI A/T Tahun 2014, HASIL SENDIRI
Rp. 11.900.000

4. MOTOR, HONDA ASTREA C 100 Tahun 1997, HASIL SENDIRI
Rp. 3.300.000

5. MOBIL, HONDA HONDA WR-V Tahun 2024, HASIL SENDIRI Rp.
309.900.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 64.750.000

D. SURAT BERHARGA Rp. 32.000.000

E. KAS DAN SETARA KAS Rp. 1.290.136.553

F. HARTA LAINNYA Rp. 150.000.000

Sub Total Rp. 6.420.286.553

III. HUTANG Rp. ----

IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III) Rp. 6.420.286.553

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.